

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan akan *good governance* semakin meningkat dari kalangan masyarakat saat ini. Bagi pemerintah layak untuk menerbitkan laporan keuangan yang mengikuti unggulan untuk peningkatan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah alat untuk meminta pertanggungjawaban manajemen pemerintah atas kinerja keuangannya. (Prasetya, 2005 dalam jurnal (Pebriantari & Andayani W, 2021). Laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan laporan keuangan kualitatif, yang meliputi laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. (Rahman & Permatasari, 2021)

Dalam menyajikan laporan keuangan, pemerintah daerah harus menyajikan dengan memuat informasi keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas atau ideal ialah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif dan dapat dipertanggungjawabkan, dari hasil laporan keuangan akan dimanfaatkan untuk entitas sebagai pedoman dalam membuat kebijakan dan keputusan penyelenggaraan pemerintahan (Putri dkk., 2021).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, laporan pertanggungjawaban keuangan harus berupa laporan keuangan, yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca Perubahan, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas Laporan, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kabupaten Banyumas merupakan salah satu yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Masih sedikitnya LKPD yang memperoleh opini WTP di Indonesia menjadi suatu fenomena penting untuk dianalisis. Menurut (Fauziyah, 2019) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bertugas melakukan pemeriksaan keuangan berupa laporan keuangan pusat dan daerah yang berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan BPK pun wajib memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah.

Tabel 1
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banyumas Tahun 2016-2020

No	Entitas	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Kab.Banyumas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Brebes	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
3	Kab. Klaten	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Kebumen	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : jateng.bpk.go.id (diakses pada tanggal 15 November 2021)

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tidak kompeten akan membuang waktu dan tenaga karena tidak mampu menyelesaikan tugasnya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Akibatnya, laporan tidak akan dibuat tepat waktu dan tidak memenuhi standar pemerintah (Tampubolon & Hasibuan, 2019)

Hal ini disebabkan bahwa sumber daya manusia sudah sepenuhnya mengetahui apa yang perlu diselesaikan agar laporan keuangan dapat disusun dan disajikan tepat waktu. Dalam hal pengambilan keputusan, semakin cepat laporan keuangan disajikan, semakin baik (Rahman & Permatasari, 2021)

penyusunan laporan keuangan tentunya harus memenuhi persyaratan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang unggul. Pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya merupakan keterampilan awal yang harus dimiliki seorang ASN. Faktor terbesar dalam pelaksanaan dan hasil laporan keuangan adalah latar belakang sumber daya manusia (SDM), karena semua kriteria peningkatan SDM dipenuhi dengan latar belakang pendidikan yang baik.

Penelitian Pujanira dan Taman (2017) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Adanya kompetensi sumber daya manusia yang mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan yang merupakan karakteristik dari kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian dari (Gasperz, 2019) mengatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Kota Maluku. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dari hasil penelitian (Pravasanti & Ningsih, 2019) yang mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan ialah Teknologi informasi, terutama dalam organisasi sektor pemerintahan, penting untuk keberhasilan organisasi lain. Aplikasi pengelolaan keuangan negara atau daerah sedang dirumuskan untuk mencapai kinerja pemerintahan yang prima. Sistem informasi keuangan sangat penting untuk proses penerapan aplikasi ini. Sistem informasi adalah seperangkat prosedur formal untuk mengumpulkan, menganalisis, dan berbagi data kepada pengguna. (Sapitri dkk., 2015)

Penggunaan teknologi informasi hanya berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah. Kemajuan yang pesat dalam teknologi informasi saat ini memberikan berbagai penghargaan bagi tata kelola bisnis. Pengolahan data dari sistem manual ke sistem komputer dan munculnya software akuntansi yang memungkinkan pembuatan laporan keuangan keduanya sangat dipengaruhi oleh perkembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di suatu perusahaan.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Banyak hal positif yang diperoleh dari adanya teknologi informasi, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah mudah, terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia dan semakin memperbesar biaya yang dikeluarkan. (Pravasanti & Ningsih, 2019)

Penerapan teknologi informasi dibatasi antara lain oleh kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang akan digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia, dan keterbatasan finansial. Masalah ini menyebabkan tidak efisiennya penggunaan teknologi informasi di pemerintahan. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan faktor terakhir yang mempengaruhi integritas laporan keuangan pemerintah daerah. (Ardianto & Eforis, 2019)

Hasil penelitian dari (Pravasanti & Ningsih, 2019) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara pasial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian dari (Tampubolon & Hasibuan, 2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Sejak paket Undang-Undang (UU) tentang laporan keuangan di luncurkan kondisi pengelolaan keuangan mengalami perubahan menuju arah yang lebih baik. Secara khusus Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan pertanggungjawaban keuangan Negara oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Paket UU ini mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun dengan baik dan benar terkait dengan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Sampai saat ini pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataannya tidak semua organisasi

pemerintahan mampu memahami Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tersebut (SAKD). Dilihat dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester I tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeiksa Keuangan (BPK) ditemukan masih banyak pemerintah daerah yang lamban dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Sistem akuntansi juga diperlukan untuk pembuatan laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan daerah. Mulai dari pendataan tahap pertama hingga pelaporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan prosedur (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan, pemerintah telah melakukan upaya penyusunan laporan yang menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah. Namun kenyataannya, tidak semua pegawai pemerintah mengenal sistem akuntansi keuangan daerah (Rahman & Permatasari, 2021).

Hasil penelitian dari (Rahman & Permatasari, 2021) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi karakteristik kualitatif yang diisyaratkan. Sehingga perlunya pembenahan terhadap sistem kinerja pada pegawai pemerintah daerah terutama bagian penatausahaan keuangan agar kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan

bermanfaat serta bernilai informasi yang akurat. Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.(Parti & Gamaliel, 2021)

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari jurnal terdahulu yang dilakukan oleh (Rahman & Permatasari, 2021) dengan mengambil variabel yaitu pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas laporan keuangan daerah. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independennya. Dalam penelitian ini menambahkan variabel bebas yaitu pemanfaatan teknologi informasi, untuk melihat apakah terdapat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan didukung dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tampubolon & Hasibuan, 2019), (Pravasanti & Ningsih, 2019) dan (Erawati, TeguhAbdulhadi, 2018) yang menyatakan Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?

C. Batasan masalah

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitas laporan keuangan daerah banyumas.
2. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) sebagai variabel independen (X) dan kualitas laporan keuangan daerah sebagai variabel dependen (Y).

D. Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Memberikan bukti empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Memberi bukti empiris pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

E. manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membaca maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Praktisi

Memberikan wawasan dan perbincangan kepada SKPD dalam penciptaan sumber daya, sistem akuntansi keuangan, teknologi informasi,

dan sistem pengendalian intern dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan. Memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia di masa depan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilaporkan telah sesuai dengan peraturan SAP yang berlaku.

